



ICW BONGKAR SERTIFIKASI HALAL MBG LEWAT JALUR HARAM



Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar dugaan korupsi proyek sertifikasi halal program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp141,7 miliar. Banyak dugaan kejanggalan. Mulai dari adanya pemecahan paket proyek, perusahaan tak berwenang, praktik subkontrak ilegal, hingga indikasi penggelembungan harga yang ditaksir merugikan negara Rp49,5 miliar. Temuan itu menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke laporan resmi ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan audit nasional terhadap seluruh dapur MBG guna memastikan makanan yang dibagikan aman dan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak mencuat. ICW juga menyoroti dugaan keterhubungan yayasan penerima proyek MBG dengan lingkaran kekuasaan. Dari 102 yayasan yang diteliti, keterkaitan itu disebut menyeret partai politik, relawan pilpres, pebisnis, birokrasi, militer, hingga individu yang pernah tersangkut kasus korupsi. Duh. BACA HAL 11...

Soal Sertifikasi Halal

- Nilai proyek sertifikasi halal MBG mencapai Rp141,7 miliar
- Potensi kerugian negara ditaksir Rp49,5 miliar
- Pengadaan diduga dipecah menjadi 4 paket proyek
- Perusahaan pelaksana disebut tidak terdaftar sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- Ada dugaan praktik subkontrak ilegal atau "pinjam bendera"
- Indikasi penggelembungan harga sertifikasi halal
- Biaya sertifikasi disebut melampaui tarif batas atas BPJPH
- ICW menilai dasar hukum pengadaan oleh BGN bermasalah
- Dugaan manipulasi tata kelola proyek untuk menghindari tender terbuka

TEMUAN ICW SOAL DUGAAN KORUPSI MBG

Soal Jejaring Pelaku MBG

Dari 102 yayasan penerima proyek MBG yang diteliti ICW, sebagian diduga terhubung dengan:

- Partai politik
- Relawan pilpres
- Pebisnis
- Birokrasi pemerintahan
- Militer
- Individu yang pernah tersangkut kasus korupsi

5 PROVINSI DENGAN DAPUR MBG

TERBANYAK (MEI 2025)

Jawa Barat
368 dapur

Jawa Tengah
170 dapur

Jawa Timur
113 dapur

Sumatera Srelatan
67 dapur

DKI Jakarta
55 dapur

Sumber: BGN

PECAT DADAN!

*kalo terbukti korup

EMBEGE DURJANA. GURU-GURU DINISTA. PENDIDIKAN DINODA.

BERANI-BERANI-NYA ENTE NGEKORUP EMBEGE.

PEHALALKAN KSA DUNIA-CHIRAT BUAT NG KORUPSI INA EMBEGE.

BERANI-BERANI-NYA ENTE NGEKORUP EMBEGE.

EMBEGE DURJANA. GURU-GURU DINISTA. PENDIDIKAN DINODA.

AUDIT MEDIS dr MYTA DITARGET TUNTAS SEPEKAN

Pemerintah tengah menyiapkan langkah tegas terkait dugaan pelanggaran penanganan medis terhadap almarhumah dr Myta Aprilia Azmi sebelum meninggal dunia saat menjalani program internship di Jambi. Sanksi yang disiapkan mulai dari pembekuan Surat Izin Praktik (SIP) hingga Surat Tanda Registrasi (STR), berdasarkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan Konsil Kesehatan Indonesia.

Kasus ini mencuat setelah keluarga dr Myta mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penanganan medis yang diterima korban saat jatuh sakit ketika bertugas. Menurut keterangan keluarga, dr Myta hanya mendapatkan infus atas permintaan pribadi dan tidak diperlakukan sebagaimana pasien yang membutuhkan penanganan serius.

Selain itu, fasilitas ambulans yang seharusnya disediakan RSUD Daud Arief Kuala Tungkal untuk merujuk dr Myta ke RSUD Raden Mattaher Jambi juga disebut tidak tersedia. Akibatnya, korban bersama keluarga harus menggunakan mobil pribadi dengan bantuan tabung oksigen selama perjalanan menuju rumah sakit rujukan.

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, mengatakan seluruh proses penanganan akan didalami melalui audit medis.

"Nah ini yang nanti pendalamannya melalui audit medis. Untuk



membuktikan apakah sesuai indikasi atau tidak," ujar Rudi pada Kamis (7/5/2026).

Budi Gunadi Sadikin meminta proses audit diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan agar hasilnya bisa segera ditindaklanjuti.

"Jadi minggu depan harusnya nanti saya minta Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi untuk kembali melakukan press conference lah untuk bisa menyampaikan kesimpulan hasil audit

medisnya itu seperti apa," kata Menkes.

Meski hasil audit medis tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena bersifat rahasia, pemerintah memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan menerima sanksi sesuai ketentuan.

Hal itu juga ditegaskan Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti. "Ya kalau nanti dalam audit dilakukan adanya pelanggaran profesi, nanti konsil kesehatan, MDP akan

memberikan rekomendasi dan konsil kesehatan Indonesia yang akan melakukan sesuai dengan apa yang ditemukakan oleh MDP," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah lebih dulu memberikan surat teguran keras kepada pihak terkait sambil menunggu hasil audit disiplin profesi.

"Sementara kami sudah memberikan surat teguran keras dan yang bersangkutan harus mengikuti audit MDP," pungkasnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap kronologi meninggalnya dokter internship dr Myta Aprilia Azmi atau dr MAA yang belakangan ramai dikaitkan dengan tingginya beban kerja selama bertugas di Jambi.

Dalam hasil investigasi awal, dr Myta bersama peserta internship lain disebut tidak pernah mendapatkan hari libur selama menjalani tugas di RSUD KH Daud Arief dan bekerja penuh selama tujuh hari dalam sepekan.

Selain itu, peserta internship juga beberapa kali harus menggantikan tugas dokter organik yang seharusnya berjaga di rumah sakit. Padahal, program internship dirancang agar dokter muda mendapat pendampingan dari dokter senior, bukan mengambil alih sepenuhnya tugas dokter organik.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka atas meninggalnya dr Myta. Ia menegaskan tidak boleh ada dokter yang meninggal akibat budaya kerja yang buruk di rumah sakit.

"Tidak boleh ada dokter yang wafat karena adanya budaya kerja yang tidak baik yang dilakukan di rumah sakit," kata Menkes Budi dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemenkes, Rudi Supriatna Nata Saputra, kemudian memaparkan kronologi lengkap kondisi dr Myta sejak awal menjalani internship hingga meninggal dunia.

Sebelum memulai program internship, dr Myta menjalani medical check up pada Agustus 2025 dan hasil pemeriksaan laboratoriumnya dinyatakan normal.

Pada 11 Agustus 2025 hingga Februari 2026, dr Myta menjalani internship di Puskesmas Kuala Tungkal II. Selama masa penugasan di puskesmas, tidak ditemukan keluhan kesehatan yang berarti.

"Sepanjang proses menjalani internship tersebut, dokter MAA tidak ada keluhan kesehatan," ujar Rudi. (wid,ist,kum/dya)

Internship RS Daud Arief Jambi Dibekukan

KEMENTERIAN Kesehatan membekukan sementara wahana internship di RSUD KH Daud Arief, Kuala Tungkal, Jambi, menyusul meninggalnya dokter internship dr Myta Aprilia Azmy.

Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, mengatakan status rumah sakit tersebut untuk sementara dicabut sebagai lokasi penempatan peserta internship hingga investigasi rampung.

"Wahana ini kita freeze, untuk sementara dulu tidak menjadi wahana sampai nanti hasil investigasi keseluruhan keluar," ujar Yuli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Kemenkes juga menarik seluruh peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internship Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) dari wahana di Kuala Tungkal, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

"Seluruh teman-teman internship saat ini kami alihkan terlebih dahulu. Jadi kita tarik semua dari wahana tersebut baik peserta PIDI maupun PIDGI dari wahana puskesmas

maupun rumah sakit di Kuala Tungkal," katanya.

Alarm Evaluasi Sistem

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai meninggalnya sejumlah dokter peserta program magang menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem internship dokter di Indonesia.

"Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia menyampaikan belasungkawa atas wafatnya para dokter muda dan menyoroti ketidakjelasan posisi peserta internship yang berada di antara status peserta didik dan tenaga layanan kesehatan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perlindungan hak dokter magang menjadi lemah, mulai dari jam kerja, jaminan kesehatan, hingga kepastian kesejahteraan.

Darurat Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

DPR PANGGIL KEMENAG: DATA ULANG SELURUH PONPES

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, memicu reaksi keras DPR RI. Indonesia disebut berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, mulai dari pesantren, sekolah hingga perguruan tinggi. DPR pun berencana memanggil kementerian terkait untuk mencari solusi menyeluruh salah satunya Kementerian Agama (Kemenag). Didesak ada pendataan ulang serta pembinaan terhadap seluruh pondok pesantren di Indonesia guna mencegah kasus serupa terus berulang.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pernyataan itu disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok



Kasat Reskrim Polresta Pati (rompi hitam) Kopol Dika Hadiyan Widya Wiratama saat berbincang dengan tersangka pencabulan berinisial AS yang ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Wonogiri, Kamis (6/5/2026). (dok.Polresta Pati)

pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, sekolah, hingga perguruan

tinggi.

“Kita akan membahas hal ini untuk mencari solusi darurat kekerasan seksual di lembaga pesantren dan lembaga pendidikan umum,” ujar

Cucun, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai kasus serupa terus berulang dan harus ditangani secara serius serta sistematis. “Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di ponpes, harus ditindak tegas,” katanya.

Cucun menyoroti sejumlah kasus yang belakangan mencuat, mulai dari dugaan pemerkosaan santriwati di pesantren Pati, pelecehan seksual oleh mahasiswa Fakultas Hukum UI, hingga dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren di Ciawi, Jawa Barat.

DPR, kata dia, mendorong adanya sistem pencegahan atau early warning agar kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa dicegah sejak dini.

“Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, harus ada early warning atau tindakan pencegahan,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku agar menimbulkan efek jera. “Penegakan hukum harus memberi sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Baik di pesantren, perguruan tinggi, maupun sekolah,” tegasnya.

Khusus untuk kasus di Pati, DPR akan meminta penjelasan terkait standar pembinaan pesantren yang mengintegrasikan perlindungan santri dalam tata kelola lembaga. Selain itu, parlemen juga akan menyoroti mekanisme pengawasan internal pesantren dan sistem pelaporan yang aman bagi santri, terutama dalam relasi kuasa yang kuat antara pengasuh dan santri.

“Juga mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau ruang-ruang internal pesantren tanpa mengganggu independensi lembaga. Lalu sistem pelaporan yang aman dan dapat diakses oleh santri, khususnya dalam situasi relasi kuasa yang kuat,” kata Cucun. (wid,ist,rls,tmo/dya)

STATISTIK KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Januari - Maret 2026)

- **Total Kasus Pendidikan:**
22 kasus kekerasan teridentifikasi oleh FSGI melalui pemberitaan media dan jaringan daerah.
- **Dominasi Kekerasan Seksual:**
Dari total kasus tersebut, 20 kasus (91%) adalah kekerasan seksual, sementara 2 kasus (9%) adalah kekerasan fisik.
- **Jumlah Korban:**
Tercatat sedikitnya 83 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun lembaga keagamaan pada awal tahun ini.
- **Tren:**
Rata-rata terjadi lebih dari 7 kasus per bulan, menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya

Izin Operasional Ponpes Ndholo Kusumo Pati Dicabut

dalam konferensi pers di Mapolresta Pati, Kamis (7/5/2026).

Kemenag juga memulangkan seluruh santri yang tercatat di Ponpes Ndholo Kusumo. Total terdapat 252 santri dari jenjang RA, MI, MTs hingga MA yang terdampak penutupan tersebut. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar akan dilakukakan secara daring sambil menunggu proses asesmen penempatan santri ke lembaga pendidikan lain.

“Dan Insha Allah, Selasa minggu depan semuanya akan kita adakan assessment untuk santri yang berjumlah 252 ini. Dalam rangka menentukan ini mau pindah di mana,” ujar Ahmad.

Ia menegaskan Kemenag tidak memberikan toleransi terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan meminta seluruh pihak ikut mengawal proses hukum hingga tuntas.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah santriwati diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh ponpes berinisial AS. Dugaan tersebut viral di media sosial dan memicu aksi demonstrasi warga

serta Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi pada 2 Mei 2026.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyebutkan jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 50 santriwati. Beberapa korban bahkan diduga sampai hamil.

Menurut Ali, tersangka diduga menggunakan doktrin agama untuk memanipulasi korban dengan mengaku sebagai wali dan keturunan nabi yang harus ditaati.

“Korban harus ikut patuh jika ingin masuk surga, doktrinnya dia Waliyullah, mengaku wali Allah. Dia juga mengaku keturunan nabi,” kata Ali. Ia menambahkan, korban juga mendapat ancaman akan dikeluarkan dari pondok apabila menolak permintaan pelaku.

Polresta Pati telah menetapkan AS sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti. Setelah sempat mangkir dari pemeriksaan, tersangka akhirnya ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati di wilayah Wonogiri pada Kamis dini hari. (wid,ist,rls/dya)



KEMENTERIAN Agama resmi mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah mencuat kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh ponpes berinisial AS. Keputusan itu diambil usai Kemenag melakukan verifikasi lapangan dan evaluasi terhadap pengelolaan pesantren.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati Ahmad Syaiku mengatakan pencabutan izin operasional dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan langsung ke lingkungan pondok pesantren.

“4 Mei sudah verifikasi faktual di lapangan, dan juga evaluasi ponpes, sehingga kami memutuskan merekomendasikan ponpes untuk dicabut izinnya. Dan alhamdulillah tanggal 5 Mei kemarin, izin operasional ponpes sudah dinyatakan dicabut,” kata Ahmad

3 DOKTER TERLIBAT SINDIKAT JOKI UTBK DI SURABAYA

Polisi telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka karena terlibat dalam sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026. Tiga orang di antara para pelaku itu ternyata berprofesi sebagai dokter.

Polrestabes Surabaya membongkar praktik sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 yang disebut telah beroperasi selama sembilan tahun sejak 2017. Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari mahasiswa, dokter, ASN P3K, hingga karyawan swasta.

"Tiga di antaranya dokter," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, di kantornya, Kamis (7/5/2026).

Luthfie menyebut, para pelaku tak terkait dengan pihak kampus atau penyelenggaraan ujian. Dia menjelaskan, ketiga dokter ini berperan sebagai makelar.

"Tiga dokter yang terlibat ini tidak ada kaitan dengan kampus atau dengan apa, tapi memang mereka katakanlah sebagai makelar atau broker. Mereka juga yang nyari-nyari pasien juga di antara lima kelompok klaster penerima (jasa joki) ini," bebernya.



Ketiga dokter ini berinisial BPH (29 tahun), DP (46 tahun), dan MI (31 tahun).

Luthfie menyampaikan, ketiga dokter ini juga sebenarnya aktif membuka praktik. Salah satunya bahkan bekerja di puskesmas.

"Jadi mereka ini praktik sebenarnya, ada satu satu dokter itu yang praktik di salah satu puskesmas di luar Surabaya," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan polisi, jurusan yang paling banyak didapat sindikat joki ini adalah Fakultas

Kedokteran.

"Kami sampaikan bahwa hasil keterangan saat ini dari penjelasan ataupun keterangan tersangka utama saudara K (IKP) ternyata yang paling diminati untuk menggunakan joki itu sebagian besar adalah dari Fakultas Kedokteran," katanya.

Kapolresta Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengatakan sindikat joki UTBK ini telah beroperasi selama sembilan tahun sejak tahun 2017 hingga 2026.

Jaringan ini diotaki oleh pria

berinisial IKP (41 tahun), seorang karyawan swasta. Dia selama ini telah mendapat klien kurang lebih 150 orang, di mana 114 di antaranya berhasil lolos masuk perguruan tinggi.

"Untuk pelaku utama sendiri yang memberikan pekerjaan ke joki atas nama atau inisial K (inisial IKP), ini juga sudah kita lakukan pengembangan dan pendalaman dan diketahui bahwa ternyata jaringan yang sudah kita berhasil lakukan penindakan, ini yang saat ini, atas nama jaringan di bawah koordinasi tersangka atas nama B," ujar Luthfie.

Selanjutnya, polisi akan mendalami hingga ke 114 pengguna joki yang lulus ke perguruan tinggi.

"Jadi artinya kita akan terus kembangkan ini baik ke atasnya jaringan-jaringan lain sampai dengan kepada pemberi order atau calon mahasiswa waktu itu dan sebagian sudah lulus yaitu sebanyak 114 orang ini kita akan dalami," tambahnya.

"Tetapi sampai dengan hari ini kita terus lakukan pendalaman dan sampai dengan saat ini sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah kita dapatkan dan kita akan terus dalami itu," ujarnya.

Polisi mengungkap ada jaringan sindikat joki UTBK lain di bawah koordinasi IKP yang masih satu rangkaian jaringan.

"Saat ini untuk jaringan K (IKP) ini, untuk K-nya sendiri sudah kita amankan dan masih kita lakukan pemeriksaan saat ini sedang berjalan nanti hasilnya akan kita rilis lebih lanjut," kata dia.

"Dan ada satu jaringan lagi di bawah koordinasi saudara Y. Yang mana ini sudah almarhum, sehingga nanti kita akan melakukan pendalaman juga mungkin jaringan-jaringan di bawahnya," imbuhnya.

Dari sindikat joki UTBK ini, IKP mendapat hasil yang bervariasi antara Rp 500 juta sampai Rp 700 juta rupiah yang kemudian dibagikan kepada jaringannya.

"Rata-rata untuk joki sendiri berkisar di kisaran Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Itu untuk beberapa kampus namun untuk kampus-kampus yang dirasa lebih favorit angkanya untuk joki bisa kisaran Rp 75 juta," ujarnya. (tin,kum/dya)

DAFTAR TERSANGKA

- N.R.S (21 tahun), mahasiswa
- I.K.P (41 tahun), karyawan swasta
- P.I.F (21 tahun), mahasiswa
- F.P (35 tahun), karyawan swasta
- B.P.H (29 tahun), dokter
- D.P (46 tahun), dokter
- M.I (31 tahun), dokter
- R.Z (46 tahun), pedagang
- H.R.E (18 tahun), pelajar
- B.H (55 tahun), wiraswasta
- S.P (43 tahun), karyawan swasta
- S.A (40 tahun), karyawan swasta
- I.T.R (38 tahun), ASN P3K
- C.D.R (35 tahun), ASN P3K

MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yulianto, menyoroti temuan praktik perjoban dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Pemerintah menegaskan tidak mentolerir kecurangan dan menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar.

"Temuan ini menjadi perhatian serius kami. Setiap bentuk kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi tidak dapat dibenarkan. Evaluasi langsung kami lakukan agar sistem semakin kuat dan akuntabel," ujar Brian.

Pemerintah Siapkan Sanksi

Ia menegaskan, kasus tersebut tidak hanya ditangani secara lokal, tetapi menjadi bahan evaluasi nasional di seluruh pusat UTBK, baik di perguruan tinggi besar maupun wilayah dengan keterbatasan pengawasan.

Pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan melalui pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan metal detector dan sistem pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan kesesuaian identitas peserta.

"Pengawasan akan terus kami tingkatkan, termasuk dengan dukungan teknologi, untuk menutup celah kecurangan dan menjaga kredibilitas seleksi," tegasnya.

Selain itu, penegakan sanksi disiapkan sebagai efek jera. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan dalam seleksi berpotensi didiskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti atau diterima di perguruan tinggi negeri manapun. Sementara itu, pihak yang

terlibat sebagai joki juga dapat dikenakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksi akan ditegakkan bagi pihak yang terbukti melanggar agar praktik serupa tidak terulang," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menegaskan komitmen penguatan keamanan seleksi nasional melalui pengawasan berlapis dan pemanfaatan teknologi deteksi kecurangan di setiap pusat UTBK.

Prof. Brian turut mengimbau orang tua dan calon mahasiswa untuk mengikuti proses seleksi secara jujur dan sesuai ketentuan.

"Persaingan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak menjunjung tinggi kejujuran," katanya. (tin,rri,ist/dya)



KSP BERTEMU DUBES ARAB SAUDI, BAHAS HAJI HINGGA INVESTASI

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Faisal Bin Abdullah H. Amodi melakukan pertemuan untuk membahas berbagai agenda strategis, mulai dari kemudahan layanan haji dan umrah, hingga investasi.

Dudung, yang pernah menjadi Amirul Haji Indonesia pada 2025, menyampaikan bahwa permasalahan pengelolaan jamaah haji saat ini semakin sedikit dan tertangani dengan baik.

"Pembangunan sarana ini diharapkan dapat semakin memudahkan dan melancarkan ibadah jamaah haji dan umrah asal Indonesia," kata Dudung dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/5/2026).

Dia juga menegaskan atensi serius Presiden Prabowo Subianto yang sedang memperjuangkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Duta Besar Faisal Bin Abdullah H. Amodi menyoroti komitmen investasi Arab Saudi sebesar 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp437 triliun yang disepakati saat kunjungan Presiden Prabowo



Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Faisal Bin Abdullah H. Amodi melakukan pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Kantor Staf Kepresidenan)

Subianto ke Arab Saudi pada Juli 2025.

Hal itu menurut dia, ditambah dengan komitmen investasi dari kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Maret 2017 sebesar 15 miliar dolar AS, sehingga total

komitmen investasi Arab Saudi ke Indonesia telah mencapai lebih dari 40 miliar dolar AS.

Pemerintah Arab Saudi berharap adanya tindak lanjut terkait komitmen tersebut, khususnya di bidang energi terbarukan dan

lingkungan.

Terkait penyelenggaraan haji, Dubes Faisal memastikan bahwa keselamatan dan keamanan jamaah haji Indonesia terjamin.

Menurut dia, saat ini Arab Saudi telah menyelesaikan 230.000 visa untuk jamaah haji Indonesia, yang merupakan jumlah terbesar di dunia atau sekitar 10 persen dari total keseluruhan jamaah haji.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Arab Saudi mengajukan permohonan kebijakan bebas visa masuk ke Indonesia bagi warga negaranya, merujuk pada kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh beberapa negara Muslim seperti Malaysia.

Selain itu, Arab Saudi juga memohon dukungan Kepala Staf Kepresidenan agar pertemuan lanjutan Dewan Koordinasi Tinggi Arab Saudi dapat dilangsungkan di Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Staf Presiden (KSP) akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan permohonan bebas visa tersebut.

KSP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji, serta merancang pertemuan lanjutan dengan Kedutaan Besar Arab Saudi.

Sebagai bentuk penghormatan dan eratnya hubungan kekeluargaan, Pemerintah Arab Saudi turut menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Staf Kepresidenan dan istri untuk menjadi Tamu Raja pada musim haji tahun 2027.

Kementerian Haji dan Umrah RI mengungkapkan bahwa jumlah jamaah calon haji asal Indonesia yang tertahan karena masalah berangkat secara tidak prosedur di Indonesia pada musim haji 2026 turun drastis.

"Tahun ini alhamdulillah sudah turun turun banyak. Total sampai hari ini mungkin belum sampai 100 (jamaah calon haji). Tadi malam Wakapolri melaporkan laporan kepada kami sekitar 60 (jamaah calon haji)," kata Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf saat pemberangkatan jamaah calon haji asal Jombang di Jombang, Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan, pada musim haji 2025, jumlah jamaah calon haji yang tertahan di bandara hingga lebih dari 1.000 orang jamaah. Mereka berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Dirinya menyebut, pada musim haji 2026 ini, Kementerian Haji dan Umrah RI membentuk satuan tugas bersama dengan Kepolisian RI serta Imigrasi Indonesia. Satgas dibentuk untuk mencegah adanya calon haji yang berangkat tidak melalui prosedur yang benar. (Wid, ant, rls/dya)

Cegah Kelelahan, Dilarang Ikut City Tour

Untuk mendukung mobilitas jamaah di Makkah, pemerintah menyediakan Bus Sholawat yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Foto: Kemenhaj



KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerbitkan surat edaran yang melarang calon jamaah haji mengikuti kegiatan ziarah maupun city tour menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kondisi fisik dan mental jamaah agar tetap prima sebelum menjalani rangkaian utama ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Juru Bicara Kemenhaj, Ihsan Marsha, menjelaskan bahwa fase Armuzna merupakan inti pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik maksimal. Karena itu, jamaah maupun Kelompok Bimbingan

Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tidak mengagendakan perjalanan ke luar Madinah maupun Makkah sebelum seluruh rangkaian Armuzna selesai.

"Larangan ini bukan membatasi jamaah, tetapi merupakan langkah perlindungan dan pemerintah ingin memastikan seluruh jamaah tetap sehat, tidak kelelahan, dan dapat memusatkan perhatian pada persiapan rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Ihsan, Kamis (7/5/2026).

Ia juga meminta seluruh pembimbing KBIHU menaati aturan tersebut demi keselamatan para jamaah. Menurutnya, setiap mobilitas jamaah wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter, bidang perlindungan jamaah, maupun sektor terkait lainnya.

"Setiap bentuk pergerakan jamaah juga wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi,

baik PPIH Kloter, bidang ataupun seksi perlindungan jamaah, maupun sektor terkait," kata Ihsan.

Sementara itu, operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-17 dilaporkan berjalan lancar. Berdasarkan data per Rabu (6/5/2026), sebanyak 103.690 jamaah yang tergabung dalam 267 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan dari Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 100.125 jamaah yang berasal dari 258 kloter sudah tiba di Madinah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Pergerakan jamaah dari Madinah menuju Makkah juga terus berlangsung secara bertahap.

Hingga kini, sebanyak 42.340 jamaah dari 109 kloter telah berada di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Selain itu, kedatangan jamaah haji gelombang kedua yang terbang langsung dari Indonesia mulai berlangsung melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Setibanya di Jeddah, para jamaah langsung diberangkatkan menuju Makkah untuk beristirahat sebelum menjalani umrah wajib di Masjidil Haram. (gus, ssn, ist/dya)

Pembangunan Koperasi Merah Putih Kota Malang Terganjil Aturan RTH

MALANG- Pembangunan gerai Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih di Kota Malang tersendat karena terganjal aturan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hingga awal Mei 2026, baru 2 koperasi yang memiliki bangunan sendiri. Sementara puluhan lainnya belum dapat dibangun akibat keterbatasan lahan.

"Sudah dua yang sudah selesai dibangun. Lokasinya di Bandungrejosari sama di Arjowinangun," ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, Kamis (7/5/2026).

Dengan total 57 kelurahan di Kota Malang, kondisi ini berarti masih terdapat sekitar 55 kelurahan yang belum memiliki bangunan gerai KMP secara mandiri. Eko menyebut, pembangunan koperasi di kelurahan lain masih menunggu kepastian terkait penggunaan lahan.

Ditegaskannya, Pemkot Malang tidak ingin melanggar aturan tata ruang yang berlaku. Oleh karena itu, pembangunan koperasi akan

menyesuaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTH yang saat ini masih dalam proses.

"Makanya kami menunggu dari hasil ranperda RTH ini. Baru dibangun," imbuhnya.

Meski belum memiliki bangunan sendiri, Eko memastikan seluruh Kopkel Merah Putih tetap beroperasi. Untuk sementara, aktivitas koperasi dijalankan di kantor kelurahan masing-masing.

"Yang lainnya sudah beroperasi juga di masing-masing kantor kelurahan. Yang dijual sembako, gas LPG, air minum. Belum ada simpan pinjam," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga mengakui keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pengembangan program prioritas Presiden Prabowo ini. Disebutnya, tidak semua aset milik pemerintah kota dapat dimanfaatkan karena terikat dengan peruntukan tata ruang.

Menurut Wahyu, sejumlah aset memang telah diinventarisasi untuk

dijadikan lokasi koperasi. Namun, sebagian besar aset tersebut masuk dalam kategori RTH yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Malang harus selektif dalam menentukan lokasi pembangunan Kopkel Merah Putih. Padahal, kebutuhan lahan untuk satu koperasi diperkirakan mencapai sekitar 100 meter persegi.

"Tetapi kami berharap dalam kurun waktu satu tahun ke depan semua kopkel sudah memiliki gerai sendiri," katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menegaskan Ranperda RTH bertujuan untuk mendorong pemenuhan target



Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi. (Santi/Lentera)

luasannya RTH di Kota Malang, yang ditargetkan minimal 20 persen dari luas wilayah keseluruhan.

Raymond juga menuturkan adanya regulasi yang melarang pendirian bangunan di atas lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH. (Santi/Dya)

8.198 Anak di Kabupaten Malang Terdeteksi Stunting



Ilustrasi: Pengukuran tinggi badan anak di posyandu wilayah Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mencatat sebanyak 8.198 anak teridentifikasi stunting berdasarkan hasil bulan timbang Februari 2026. Bahkan, sejumlah wilayah tercatat memiliki prevalensi di atas 10 persen.

"Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 140.137 anak yang dilakukan di 39 puskesmas se Kabupaten Malang," ujar Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, Kamis (7/5/2026).

Wiyanto menyebut, jika dibandingkan dengan tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Malang cukup mengalami penurunan, yakni dari 6,52 persen berdasarkan hasil bulan timbang di Agustus 2025. Menjadi 5,85 persen di tahun 2026 ini.

"Agustus 2025 lalu prevalensi stunting sebesar 6,52 persen. Sehingga prevalensinya menurun 0,67 persen," katanya.

Namun, Wiyanto mengakui masih terdapat sejumlah wilayah kerja puskesmas dengan prevalensi stunting cukup tinggi.

Puskesmas Sumbermanjing Wetan (Sumawe) menjadi wilayah dengan angka tertinggi mencapai 15,9 persen. Disusul Puskesmas Pujon sebesar 12,3 persen, Puskesmas Karangploso 12,0 persen, dan Puskesmas Bululawang 10,6 persen.

Hasil tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Malang untuk memperkuat intervensi penanganan stunting di wilayah-wilayah prioritas. Dinkes menargetkan angka prevalensi kembali turun pada bulan timbang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.

"Agustus nanti akan ada bulan timbang lagi. Target kami, prevalensi stunting bisa terus menurun," katanya.

Selain bulan timbang, tahun ini Pemkab Malang juga akan menghadapi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI. Berbeda dengan bulan timbang yang menyangkut seluruh balita, SSGI dilakukan dengan metode pengambilan sampel di tiap wilayah.

Wiyanto menyebut, hasil SSGI di 2 tahun lalu menunjukkan angka stunting Kabupaten Malang masih berada di kisaran 20 persen lebih. Karena itu, pihaknya menargetkan hasil survei tahun ini dapat ditekan hingga berada di bawah 20 persen.

Salah satu langkah yang terus didorong untuk menekan angka stunting adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program tersebut tidak hanya dilakukan oleh puskesmas, tetapi juga melibatkan pemerintah desa melalui dukungan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD).

"PMT itu bisa dari puskesmas maupun desa dengan menganggarkan dari ADD. Kami akan memantau pelaksanaannya," jelasnya.

Program PMT pun mulai

dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif agar mudah diterima anak-anak. Di Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, lanjutnya, PMT diberikan dalam bentuk kue kering berbahan tepung kelor dan tepung lele yang dikreasikan dengan bentuk menarik.

"Kue tepung lele dibuat menyerupai karakter monster berwarna kuning, sementara kue berbahan kelor diberi tambahan topping coklat agar lebih disukai anak-anak. Ini diberikan secara rutin setiap pekan," kata Wiyanto. Selain PMT, Dinkes juga menekankan pentingnya penguatan peran kader kesehatan, PKK desa, dan posyandu dalam upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui kegiatan rembuk stunting di tingkat desa maupun kecamatan.

"Rembuk stunting tersebut juga sebagai wadah bagi kader untuk diskusi terkait temuan dan perawatan stunting," imbuhnya.

Ditambahkannya, penanganan stunting tidak boleh berhenti pada tahap penimbangan berat dan tinggi badan semata. Anak-anak yang telah teridentifikasi stunting harus mendapatkan tindak lanjut berupa pemantauan gizi dan pendampingan secara berkala. (Santi/Dya)

SAAT ADA SINYAL DAMAI, AS TEMBAKI TANKER IRAN

Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan semakin dekat menandatangani memorandum saling pengertian untuk mengakhiri perang. Namun, tiba-tiba militer Amerika Serikat (AS) mengklaim telah menembaki sebuah kapal tanker berbendera Iran di kawasan Teluk Oman.

Disebutkan, kapal tersebut diduga melanggar blokade laut yang diberlakukan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Insiden itu terjadi ketika kapal tanker bernama M/T Hasna tetap melanjutkan pelayaran menuju Iran meski telah diberi peringatan berulang kali oleh pasukan AS.

Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut jet tempur Angkatan Laut AS menembakkan sejumlah peluru dari meriam kaliber 20 mm untuk melumpuhkan kapal tanker tersebut pada Rabu (6/5/2026) pagi waktu setempat. Kapal itu disebut tidak mematuhi instruksi penghentian dari militer AS.

"Setelah awak kapal gagal mematuhi peringatan berulang kali, pasukan AS melumpuhkan kemudi kapal tanker dengan menembakkan beberapa peluru dari meriam 20mm



Iran merilis video pada Rabu (6/5/2026) yang diklaim menunjukkan puing-puing pesawat nirawak pengintai tempur yang ditembak jatuh oleh pasukan pertahanannya di atas Selat Hormuz. Video tersebut dipublikasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. (REUTERS)

dari pesawat tempur F/A-18 Super Hornet Angkatan Laut AS yang diluncurkan dari USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna tidak lagi transit ke Iran," demikian pernyataan CENTCOM yang dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/5/2026).

CENTCOM menegaskan bahwa

kebijakan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar maupun masuk pelabuhan Iran masih diberlakukan sepenuhnya. "Blokade AS terhadap kapal-kapal yang mencoba masuk atau keluar dari pelabuhan Iran tetap berlaku sepenuhnya," lanjut pernyataan tersebut.

Iran Desak AS Beri Timnasnya Visa untuk Laga Piala Dunia

Pemerintah Iran menegaskan Amerika Serikat (AS) wajib memberikan visa kepada tim nasional sepak bola Iran untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026, meski hubungan politik kedua negara masih memanas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan pemerintah Iran tengah melakukan berbagai upaya agar partisipasi tim nasionalnya di turnamen yang digelar di Amerika Serikat tidak menghadapi hambatan administratif maupun politik.

"Para pemain kami akan berangkat ke Amerika Serikat semata-mata untuk Piala Dunia," kata Baghaei pada Rabu malam (6/5/2027), seperti dikutip kantor berita Mehr.

Ia menegaskan negara tuan rumah memiliki kewajiban menjamin penerbitan visa bagi seluruh anggota tim Iran tanpa mempertimbangkan persoalan politik antara kedua negara.

"Negara tuan rumah harus memiliki komitmen yang jelas untuk

menjamin visa anggota tim Iran diterbitkan tanpa mempertimbangkan masalah politik," ujarnya.

Baghaei juga berharap FIFA mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga kredibilitas organisasi tersebut. Ia menyinggung adanya pandangan yang menyebut tim nasional Iran tidak layak tampil di turnamen FIFA.

Menurutnya, Iran akan memanfaatkan "semua kapasitas yang tersedia" untuk memastikan kebutuhan tim nasional dapat terpenuhi selama berlaga di Piala Dunia.

Terkait tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Iran dan Amerika Serikat, Baghaei menyebut Seksi Urusan Iran di Washington yang berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar Pakistan siap memberikan bantuan yang diperlukan kepada tim nasional Iran.

Saat ditanya mengenai perkembangan negosiasi damai Iran-AS, Baghaei enggan memberikan komentar lebih jauh.

"Untuk saat ini, kami fokus pada olahraga," katanya.

Diketahui, 2026 FIFA World Cup akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Iran dijadwalkan menjalani dua laga awal di Los Angeles melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Setelah itu, Iran akan menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan memblokir Selat Hormuz. (wid,ist/dya)

Militer AS juga mengklaim pihaknya terus bertindak secara profesional dalam menjalankan operasi pengawasan dan penegakan blokade di kawasan tersebut. CENTCOM menyatakan pasukannya bertindak "dengan cermat dan profesional untuk memastikan kepatuhan."

Sebelumnya, CENTCOM mengungkapkan bahwa kebijakan blokade laut yang diterapkan Washington telah membuat lebih dari 50 kapal komersial memutar balik dan kembali ke pelabuhan asal.

Ketegangan antara AS dan Iran di kawasan Teluk Oman serta Selat Hormuz terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebelum insiden terbaru ini, Iran sempat membantah tuduhan bahwa militernya menyerang kapal Korea Selatan di Selat Hormuz. Di sisi lain, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah atas serangan yang dikaitkan dengan Iran.

Amerika Serikat dan Iran dikabarkan semakin mendekati kesepakatan awal untuk menghentikan konflik yang selama ini memanas di kawasan Timur Tengah. Kedua negara disebut tengah membahas memorandum saling pengertian satu halaman yang akan menjadi dasar penghentian perang sekaligus membuka jalan bagi negosiasi lanjutan terkait program nuklir Iran.

Laporan Axios yang dikutip Anadolu pada Kamis (7/5/2026) menyebut Washington saat ini menunggu tanggapan resmi dari Teheran atas sejumlah poin penting dalam waktu 48 jam ke depan. Meski belum mencapai kesepakatan final, situasi terbaru disebut menjadi momentum paling dekat bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian sejak konflik dimulai.

Dalam proposal yang sedang dinegosiasikan, Iran diminta menghentikan sementara pengayaan uranium. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat disebut akan mencabut sejumlah sanksi ekonomi, membuka akses terhadap dana Iran yang selama ini dibekukan, serta melonggarkan pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. (gus,ist,kum/dya)

Aksi militer AS membombardir sebuah kapal tanker milik Iran di Selat Hormuz. (dok)





APAKAH RADIASI PONSEL BENAR-BENAR MEMICU KANKER?

Kekhawatiran masyarakat mengenai dampak radiasi ponsel terhadap risiko kanker otak kembali menjadi perbincangan hangat di tengah melonjaknya durasi penggunaan gawai pada April 2026. Meskipun isu ini terus berulang,

para ahli kesehatan dan peneliti radiasi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah kuat yang menghubungkan penggunaan ponsel secara langsung dengan kerusakan DNA atau pertumbuhan tumor. Hal ini berdasar pada fakta teknis

bahwa ponsel memancarkan radiasi non-pengion yang memiliki tingkat energi terlalu rendah untuk merusak sel-sel manusia secara permanen.

Walaupun Organisasi Kesehatan Dunia memasukkan medan elektromagnetik frekuensi radio ke dalam kategori kemungkinan karsinogenik, klasifikasi tersebut sebenarnya menempatkan ponsel dalam tingkatan yang sama dengan konsumsi kopi atau acar sayuran.

Artinya, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan dampak berbahaya secara langsung pada manusia, tetapi penelitian dan pengamatan jangka panjang tetap terus dilakukan untuk memastikan tingkat keamanannya.

Status ini menunjukkan bahwa bukti keterkaitan antara radiasi ponsel dan kanker masih sangat terbatas

serta belum mencapai tingkat kepastian medis yang mengkhawatirkan bagi pengguna harian.

Memasuki era teknologi yang lebih maju di tahun 2026, studi terbaru mengenai jaringan 5G justru memberikan kabar baik bagi dunia kesehatan.

Meskipun teknologi ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, daya tembus gelombangnya ke dalam kulit manusia ternyata jauh lebih dangkal dibandingkan teknologi generasi sebelumnya.

Hal ini berarti paparan terhadap organ dalam tubuh justru semakin minimal, yang sekaligus mematahkan misinformasi bahwa kemajuan teknologi nirkabel akan meningkatkan risiko kematian akibat radiasi.

Meskipun dinyatakan tidak berbahaya secara langsung, melakukan tindakan pencegahan sederhana tetap disarankan untuk membantu menjaga kenyamanan fisik dan mengurangi paparan perangkat secara berlebihan dalam aktivitas sehari-hari.

Gunakan Hands-free atau Speaker

Saat melakukan panggilan telepon dalam waktu lama, sebaiknya jauhkan perangkat dari kepala sesekali untuk mengurangi kontak langsung dengan kulit dan memberi jeda pada area telinga maupun pipi yang terkena paparan perangkat.

Hindari Kantong Celana

Simpan ponsel di dalam tas atau letakkan di atas meja saat tidak digunakan daripada menaruhnya di saku baju atau celana, guna membantu meminimalkan paparan perangkat pada area tubuh dan organ vital dalam jangka waktu yang lama.

Matikan Saat Tidur

Hindari meletakkan ponsel di bawah bantal atau terlalu dekat dengan tubuh saat tidur. Aktifkan mode pesawat (airplane mode) atau simpan perangkat di luar area tidur agar suasana istirahat lebih nyaman dan kualitas tidur tetap terjaga dengan baik.

Gunakan Saat Sinyal Kuat

Ponsel cenderung memancarkan radiasi lebih tinggi ketika sedang berusaha mencari jaringan di area dengan sinyal lemah. Karena itu, sebaiknya hindari penggunaan ponsel secara intensif di lokasi minim sinyal agar penggunaan perangkat menjadi lebih efisien dan nyaman.

Batasi Screen Time Anak

Mengingat tengkorak anak lebih tipis dibanding orang dewasa, membatasi durasi penggunaan gadget lebih ditujukan untuk membantu menjaga kesehatan mata, kualitas istirahat, serta mendukung perkembangan saraf dan konsentrasi mereka selama masa pertumbuhan. (Nathasya_UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Dampak Fisik yang Serius

Risiko Metabolik & Obesitas:

Screen time berlebihan meningkatkan risiko kegemukan (overweight) 5,6 kali dan obesitas 3,7 kali dibanding mereka yang memiliki screen time seimbang.

Gangguan Kesehatan Mata:

Terlalu lama menatap layar (HP/laptop) memicu mata lelah, kering, iritasi, hingga meningkatkan risiko rabun jauh (miopia), terutama pada anak-anak.

Masalah Postur Tubuh:

Nyeri punggung dan leher kronis sering terjadi karena kebiasaan menunduk (gadget posture).

Sindrom Penglihatan Komputer (CVS):

Penggunaan layar berkepanjangan menyebabkan mata tegang dan sakit kepala.

Asteroid Raksasa 'God of Chaos' Diprediksi Lintasi Bumi di 2029

Asteroid raksasa 99942 Apophis diperkirakan akan melintas dekat Bumi dan berpotensi terlihat dengan mata telanjang tanpa bantuan teleskop. Benda langit ini dijadwalkan mencapai jarak terdekatnya dengan Bumi pada 13 April 2029.

Berdasarkan laporan NASA, asteroid yang dijuluki "God of Chaos" atau Dewa Kekacauan tersebut akan melintas pada jarak sekitar 32 ribu kilometer dari Bumi.

Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan rata-rata jarak Bulan ke Bumi, bahkan berada di bawah orbit sebagian satelit geostasioner.

Pendekatan asteroid ini diperkirakan dapat diamati dari wilayah Bumi belahan timur, selama kondisi cuaca mendukung. Para astronom menyebutkan, jaraknya yang relatif dekat memungkinkan objek tersebut terlihat tanpa bantuan teleskop maupun teropong.

99942 Apophis pertama kali ditemukan pada 2004. Saat itu, NASA mengklasifikasikannya sebagai asteroid berpotensi berbahaya

karena sempat diperkirakan memiliki peluang bertabrakan dengan Bumi pada 2029, 2036, atau 2068.

Namun, setelah dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap orbitnya menggunakan teleskop optik dan radar berbasis darat, para ilmuwan kini memastikan bahwa tidak ada ancaman tumbukan dengan Bumi, setidaknya dalam 100 tahun ke depan.

NASA juga menjelaskan bahwa gaya gravitasi Bumi berpotensi memengaruhi lintasan Apophis saat melintas pada 2029.

Perubahan tersebut bisa berupa pelebaran jalur orbit atau pergeseran periode orbitnya mengelilingi Matahari. Meski demikian, kemungkinan terjadinya tabrakan dengan Bumi tetap tidak berubah.

Lintasan yang sangat dekat dengan Bumi memberi peluang bagi para astronom di berbagai negara untuk mengamati dan mempelajari asteroid ini secara lebih rinci.

Asteroid 99942 Apophis sendiri diambil dari nama Yunani untuk dewa Mesir, Apep. Penamaan tersebut diusulkan oleh tim astronom yang pertama kali menemukan objek ini.

Sebagai bagian dari benda langit purba, Apophis diyakini merupakan sisa pembentukan awal tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Materialnya berasal dari sisa-sisa yang tidak berkembang menjadi planet maupun satelit alami.

Meski ukuran dan bentuk pastinya belum dapat dipastikan secara detail, asteroid ini diperkirakan memiliki diameter rata-rata sekitar 1.115 kaki, dengan panjang sumbu terbesarnya mencapai sedikitnya 1.480 kaki.

Penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology menunjukkan bahwa permukaan Apophis telah mengalami pelapukan akibat paparan lingkungan antariksa selama jutaan tahun. Proses tersebut dipicu oleh interaksi dengan angin matahari serta radiasi sinar

kosmik.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai karakteristik fisiknya, sejumlah observatorium di berbagai belahan dunia, termasuk yang berada di luar angkasa, akan melakukan pengamatan intensif saat asteroid ini melintas dekat Bumi.

Setelah peristiwa pendekatan pada 2029, NASA berencana mengalihkan jalur pesawat ruang angkasa guna melakukan pertemuan langsung dengan 99942 Apophis untuk mempelajari karakteristik asteroid tersebut secara lebih rinci.

Pengamatan ini diharapkan dapat membantu ilmuwan memahami bentuk, struktur permukaan, serta pergerakan asteroid saat melintas dekat Bumi. Sementara itu, European Space Agency juga menyiapkan misi khusus untuk meneliti asteroid tersebut dari jarak dekat.

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data penting mengenai komposisi dan perilaku Apophis guna mendukung pengembangan sistem pemantauan asteroid di masa depan. Menurut laporan ESA, saat melintas pada April 2029, Apophis akan dikategorikan dalam kelompok asteroid "Apollo".

Kelompok ini mencakup asteroid yang orbitnya memotong lintasan Bumi, tetapi memiliki jalur mengelilingi Matahari yang lebih luas dibandingkan orbit Bumi.

Karena karakteristik orbitnya tersebut, asteroid jenis Apollo menjadi salah satu objek yang terus dipantau oleh para astronom dunia. (Ella Mahasiswa UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Two-Block Haircut, Tampil Maksimal ala Bintang Korea

Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya rambut pria semakin berkembang. Salah satu model yang terus bertahan dan tetap digemari adalah two-block haircut. Potongan rambut yang identik dengan gaya pria Korea Selatan ini dikenal simpel, modern, dan cocok dipakai di berbagai suasana, mulai dari kampus, kantor, hingga acara santai.

Tak heran jika two-block haircut menjadi favorit banyak pria muda yang ingin tampil rapi tanpa terlihat terlalu formal.

Two-block haircut adalah model rambut dengan konsep dua bagian berbeda. Bagian samping dan belakang dipotong lebih pendek

atau dicukur tipis, sementara bagian atas dibiarkan lebih panjang dan tebal. Perbedaan panjang inilah yang menciptakan siluet tegas dan memberi kesan lebih trendi.

Potongan ini pertama kali populer lewat budaya pop Korea, terutama dari para idol K-pop dan aktor drama Korea yang kerap tampil dengan gaya rambut rapi namun tetap trendi. Seiring waktu, two-block haircut tidak hanya dikenal di Korea Selatan, tetapi juga berkembang menjadi gaya universal yang disukai di berbagai negara

karena tampilannya yang modern dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian. Salah satu daya tarik utama model ini adalah fleksibilitasnya. Rambut bagian atas yang lebih panjang bisa diatur sesuai mood atau kebutuhan, mulai dari tampilan santai, messy, hingga gaya yang lebih rapi dan formal untuk berbagai kesempatan.

Ingin tampil formal? Sisir ke samping dengan sedikit pomade. Mau terlihat santai? Biarkan natural dengan tekstur messy. Ingin lebih berani? Tambahkan poni depan ala artis Korea.

Selain itu, bagian samping yang tipis membuat wajah terlihat lebih bersih dan segar. Cocok bagi pria yang mudah merasa gerah di iklim tropis.

Kabar baiknya, two-block haircut termasuk model rambut yang mudah menyesuaikan berbagai bentuk wajah sehingga banyak diminati. Wajah oval biasanya cocok dengan hampir semua variasi gaya ini karena proporsi wajahnya sudah seimbang.

Sementara bagi pemilik wajah bulat, bagian atas rambut dapat dibuat lebih bervolume agar wajah terlihat lebih panjang dan tegas. Untuk wajah kotak, two-block haircut mampu memberikan kesan maskulin melalui potongan sisi yang rapi dan tegas.

Sedangkan pemilik wajah panjang bisa menambahkan poni agar proporsi wajah tampak lebih seimbang dan tidak terlalu memanjang. Tak hanya itu, gaya rambut ini juga cocok diterapkan pada rambut lurus, bergelombang, hingga sedikit ikal sehingga terlihat fleksibel untuk berbagai jenis rambut.

Cara Menata Agar Maksimal

Agar tampilan two-block haircut lebih standout, gunakan produk styling

secukupnya. Wax untuk hasil natural dan tekstur ringan; pomade untuk gaya klimis dan rapi; hair powder untuk volume ekstra dan sea salt spray untuk efek messy ala beach look.

Gunakan pengering rambut dengan arah ke atas agar rambut terlihat lebih bervolume dan bagian atasnya tampak lebih rapi saat ditata.

Teknik sederhana ini juga membantu menciptakan kesan rambut yang lebih penuh dan mudah dibentuk sesuai gaya yang diinginkan.

Meski tergolong mudah dirawat, two-block haircut tetap perlu trimming rutin setiap 3-5 minggu agar bagian samping tidak cepat memanjang dan kehilangan bentuk khasnya.

Perawatan rutin akan membuat potongan tetap terlihat bersih, rapi, dan nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Gunakan sampo sesuai jenis rambut dan hindari penggunaan produk styling secara berlebihan agar kulit kepala tetap sehat dan rambut tidak mudah lepek.

Memilih produk perawatan yang tepat juga dapat membantu menjaga tekstur rambut tetap ringan dan mudah diatur. Two-block haircut membuktikan bahwa potongan rambut sederhana bisa memberi perubahan besar pada penampilan.

Dengan sentuhan modern, mudah diatur, dan cocok untuk banyak karakter wajah, model ini layak menjadi pilihan utama bagi pria yang ingin tampil lebih segar, stylish, dan percaya diri dalam berbagai suasana.

Kalau ingin upgrade penampilan tanpa perubahan ekstrem, two-block haircut bisa jadi langkah pertama yang tepat karena memberikan tampilan baru yang modern tanpa harus mengubah gaya secara berlebihan. (Nathasya_UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)



ICW Bongkar Sertifikasi ...dari hal 1

Lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Laporan itu disampaikan dua pegiat ICW, yakni Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Wana Alamsyah serta peneliti ICW Zararah Azhim Syah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

ICW menghitung potensi kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp49,5 miliar. Selain Kepala BGN, laporan juga menyeret sebuah perusahaan yang ditunjuk BGN dalam pengadaan jasa sertifikasi halal.

“Potensi kerugian negara yang kami hitung adalah tadi Rp49,5 miliar dari tata kelola yang bermasalah terkait dengan pengadaan sertifikasi jasa halal,” kata Wana.

Menurut ICW, ada empat persoalan utama yang ditemukan dalam proyek itu, yakni dasar hukum pengadaan, pemecahan paket proyek, dugaan praktik pinjam bendera, hingga indikasi pengelembungan harga.

Wana menjelaskan, pengadaan jasa sertifikasi halal oleh BGN dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025, kewajiban sertifikasi halal justru dibebankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan kepada BGN.

Ia juga menyinggung Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 yang menegaskan tanggung jawab sertifikasi halal berada di tingkat SPPG.

“Lalu kemudian di dalam juknis pengelolaan SPPG itu juga dimandatkan bahwa yang dilakukan atau yang diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal itu adalah SPPG. Ditambah dengan setiap harinya SPPG itu menerima uang insentif sebesar Rp6 juta,” ujar Wana.

Selain itu, ICW menilai BGN sengaja memecah proyek menjadi empat paket meski lokasi, jenis pekerjaan, volume, waktu pelaksanaan, hingga penyediannya sama. Menurut ICW, langkah itu diduga dilakukan agar proyek tidak melalui mekanisme tender terbuka.

“Nah, masalahnya adalah di pengadaan tersebut diduga BGN itu melakukan pemecahan paket, sehingga kepala BGN itu tidak bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang mana berimplikasi terhadap dirinya sendiri,” kata Wana.

Ia menambahkan, pemecahan paket diduga berkaitan dengan upaya menghindari pendapat ahli hukum kontrak dan pembatasan tanggung jawab pengguna anggaran.

ICW juga menyoroti perusahaan yang bekerja sama dengan BGN karena tidak terdaftar sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Perusahaan itu juga disebut tidak memiliki kewenangan melakukan pendampingan sertifikasi halal.

Dari temuan tersebut, ICW menduga pekerjaan utama proyek dialihkan kepada pihak lain melalui skema subkontrak.

“Padahal di dalam ketentuan pengadaan itu, dimandatkan bahwa tidak boleh pekerjaan utama itu disubkontraktorkan kepada pihak lain,” ujar Wana.

Sementara itu, Zararah Azhim Syah mengungkap total nilai empat

paket pengadaan sertifikasi halal MBG mencapai Rp141,7 miliar dengan total volume 4.000 pekerjaan.

Ia membandingkan nilai kontrak tersebut dengan tarif batas atas sertifikasi halal berdasarkan ketentuan BPJPH yang mencapai sekitar Rp23,05 juta per sertifikasi.

Menurut Azhim, jika mengacu pada tarif tertinggi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp49,5 miliar yang diduga merupakan pengelembungan harga.

“Saya ingin menekankan bahwasanya tarif yang tercantum di sini, ini adalah tarif batas atas. Jadi tidak boleh ada penyedia jasa sertifikasi halal atau LPH, lembaga pemeriksa halal, yang boleh menetapkan tarif di atas tarif ini. Jadi ini sudah tarif tertinggi, maka

sudah termasuk di dalamnya komponen keuntungan,” katanya.

ICW menyebut proyek sertifikasi halal tersebut dikerjakan oleh PT BKI dengan total kontrak Rp141,7 miliar untuk 4.000 pekerjaan sertifikasi.

Hingga kini Kepala BGN Dadan Hindayana belum memberikan respons atas laporan ICW tersebut. BBC News Indonesia menyebut telah meminta tanggapan kepada Dadan, namun belum memperoleh jawaban.

Sementara Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengaku tidak mengetahui detail pengadaan proyek sertifikasi halal itu.

“Saya tidak tahu menahu kalau terkait pengadaan,” kata Nanik.

Ia kemudian mempersilakan pertanyaan mengenai proyek tersebut diajukan langsung kepada Kepala BGN. Di sisi lain, program sertifikasi halal MBG terus berjalan. Per Februari 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 2.340 SPPG telah memiliki sertifikat halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan percepatan sertifikasi dilakukan dengan menempatkan penyelia halal di setiap dapur MBG. (tin,bbc,ist,rls/dya)



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) diteken langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar (kanan) dan Kepala BGN Dadan Hindayana (kiri) di kantor BGN, Jakarta, Kamis 7 Mei 2026 (Foto: BPOM)

DPR Desak Audit Nasional

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Vita Ervina meminta pemerintah melakukan audit nasional terhadap seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjamin makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan memenuhi standar kesehatan.

Menurut Vita, program MBG seharusnya benar-benar menghadirkan makanan sehat dan aman bagi anak. Karena itu, anggaran besar yang dialokasikan pemerintah diminta fokus pada pemenuhan gizi, bukan sekadar mengejar jumlah pelaksanaan program.

Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Magelang, Kamis (7/5), sebagai respons atas berbagai persoalan dalam pengelolaan dapur MBG yang belakangan menjadi sorotan publik.

Vita menilai pemerintah perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit menyeluruh terhadap sistem kelayakan dan sanitasi dapur penyedia MBG.

“Intinya kita berharap anggaran yang diarahkan ini benar-benar untuk makan bergizi gratis bagi

anak-anak. Tujuan program ini tentu menghadirkan makanan yang sehat dan aman,” katanya.

Ia menegaskan audit nasional terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus segera dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut dia, pelaksanaan MBG selama ini lebih banyak mengejar target kuantitas, sementara standar dapur belum sepenuhnya dibakukan secara layak.

“Kita terus mengejar kuantitas, tetapi standarisasi dapurnya belum benar-benar ditetapkan dan dibakukan layak digunakan untuk menghadirkan MBG yang sehat dan aman,” ujar Vita.

Politikus DPR itu juga menekankan bahwa aspek kesehatan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berperan aktif memastikan seluruh makanan yang dibagikan kepada anak-anak memenuhi standar kesehatan.

“Dari Kementerian Kesehatan tentu kata sehat menjadi sangat penting. Kita ingin seluruh

masyarakat sehat, terutama anak-anak yang menerima program tersebut benar-benar sehat. Karena itu, pengelolaan makanan yang diberikan juga harus sehat,” katanya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan dan mutu pangan. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor BGN, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kedua lembaga yang telah diteken sejak 23 Januari 2025.

Taruna Ikrar menegaskan Program MBG merupakan program strategis nasional sehingga membutuhkan sistem pengawasan pangan yang kuat, terintegrasi, dan berbasis ilmiah. Menurut dia, langkah tersebut penting agar makanan yang diterima masyarakat tetap aman, bermutu, serta memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Keamanan dan mutu pangan menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Sehingga diperlukan sistem pengawasan yang kuat, terintegrasi, dan berbasis ilmiah untuk melindungi masyarakat,” ujar Taruna. (wid,ist,kum/dya)



Perdana, Prabowo Bawa Maung ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menggunakan kendaraan taktis ringan Maung saat kunjungan kerja ke Filipina, Kamis (7/5/2026). Mobil berpelat Indonesia-1 itu menjemput Prabowo setibanya di Bandara MCAA General Aviation Terminal, Cebu, menjelang agenda Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut penggunaan Maung menjadi simbol kebanggaan industri pertahanan nasional Indonesia di panggung internasional. (dok.setpres)

TERSERET KORUPSI IMPORTASI,

PURBAYA BELUM NONAKTIFKAN DIRJEN BEA CUKAI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Diketahui, namanya muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama muncul dalam dakwaan terhadap pemilik PT Blueray Cargo, John Field, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi importasi barang.

"Tidak [menonaktifkan], karena saya kan belum terlalu jelas ini kasusnya seperti apa. Ini kan baru disebutkan tadi malam di pengadilan itu, ya? Nanti kita lihat seperti apa kelanjutan prosesnya," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah terhadap Djaka.

"Namanya baru muncul. Masalah langsung berhenti. Kita lihat sampai clear, sejas-jelas seperti apa kasus itu baru kita akan ambil tindakan," tegasnya.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Djaka terkait perkara tersebut. Menurut Purbaya, Djaka siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

Selain itu, Kementerian Keuangan disebut akan memberikan pendampingan hukum apabila Djaka dipanggil penyidik atau aparat penegakhukum.

"Ada pasti ada lah pendampingan hukum. Kalau Pak Djaka misalnya dipanggil segala macam. Yang lain kan ada pendampingan juga, bukan intervensi ya. Kalau di luar negeri juga kan sama ada pendampingan



Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama
 Foto: Dok. Bea Cukai

hukum," katanya.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga takbersalah.

"Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," ujar Budi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buka suara terkait munculnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam dakwaan kasus dugaan korupsi importasi barang yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi

Prasetyo menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," kata Budi, Kamis (7/5/2026).

Dalam surat dakwaan disebutkan, pada Juli 2025 berlangsung pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, antara sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pengusaha kargo, termasuk John Field dari Blueray Cargo Group. (wid ist,rls/dya)

POIN-POIN KASUS BEA CUKAI

Kasus Utama

Dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Nama yang Terseret

Nama Djaka Budi Utama muncul dalam dakwaan Jaksa KPK terkait dugaan pengondisian jalur impor.

Lokasi Pertemuan

Pertemuan pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo disebut berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta sekitar Juli 2025.

Pihak yang Disebut

- Djaka Budi Utama
- Rizal Fadillah
- Sispryan Subiaksono
- Orlando Hamonangan Sianipar
- John Field

Dugaan Suap

Periode Juli 2025-Januari 2026, diduga ada pemberian uang Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC.

Fasilitas Mewah

Diduga ada pemberian hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar.

Rincian Dugaan Penerimaan

- Rizal Fadillah:** sekitar Rp2 miliar tiap penyerahan
- Sispryan Subiaksono:** Rp1 miliar
- Orlando Sianipar:** Rp450-600 juta
- hiburan:** Rp1,45 miliar
- jam tangan Tag Heuer:** senilai Rp65 juta